

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN KAB.PASER

Visi : Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Sistem Transportasi yang Handal

Misi : **1.** Mewujudkan Sarana dan Prasarana Transportasi yang layak;
2. Mewujudkan SDM Transportasi yang bermutu, Kreatif dan produktif.
3. Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Peduli transportasi umum;
4. Mewujudkan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan berprestasi

Tujuan : **1.** Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai;
2. Meningkatkan sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat peduli transportasi umum ;
4. Meningkatkan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan berprestasi.

Tugas : Melaksanakan Perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan transportasi, pelayanan perizinan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum bidang transportasi serta bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bidang transportasi

Fungsi : **1.** Pengumpulan bahan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan dinas.
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan penumpang dan barang.
3. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas, pemberian fasilitas bimbingan keselamatan dan ketertiban transportasi.
4. pemberian perizinan dan fasilitas bimbingan penyelenggaraan angkutan penyeberangan, angkutan laut, dan penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi.

5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasi bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan publik serta penyelenggaraan dan pelaksanaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan D.I. Panjaitan (Tapis) Tana Paser
Telp. (0543) 5235009 Faks. (0543) 5235010 Kode Pos 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER NOMOR : / /DISHUB

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
2. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;
11. Peraturan Bupati Paser nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal, 18 Januari 2018

KEPALA DINAS,

H. FADRIANSYAH, ST, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19590226 197903 1 001

Tembusan :

1. Bupati Paser di TanaPaser;
2. Inspektur Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Bidang dan Kepala UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Kab. Paser

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : / /DISHUB
TANGGAL : 18 Januari 2018
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang memadai	Ketersediaan Halte Bus, Gedung Terminal yang dibangun	Jumlah Halte Bus, Gedung Terminal yang dibangun	Dinas Perhubungan
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang tersedia	
		Tingkat Pengetahuan Masyarakat/Pengguna Jasa Transportasi Tentang Perhubungan	Masyarakat/Pengguna Jasa Transportasi yg memiliki pengetahuan Tentang Perhubungan	
		Kelancaran monitoring kapal-kapal dipelabuhan	Monitoring kapal-kapal dipelabuhan	
		Jumlah terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terkelola	Jumlah terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terkelola	
		Rambu-rambu lalu lintas yg dilakukan pemasangan dan pemeliharaan	Jumlah Rambu-rambu lalu lintas terpasang dan dipelihara	
		%tase ketersediaan perencanaan pembangunan jaringan transportasi	$\frac{\text{perencanaan pembangunan jaringan transportasi tersedia}}{\text{seluruh pembangunan jaringan transportasi}} \times 100\%$	
		Koordinasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yg di koordinasikan	
		Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan	

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB
		%tase pelayanan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	$\frac{\text{Terminal ASDP yg dilakukan pelayanan}}{\text{Seluruh Terminal ASDP yg tersedia}} \times 100\%$	
		%tase Monitoring & Evaluasi pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Kegiatan yg dimonitoring dan dievaluasi}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan}} \times 100\%$	
		%tase Pelayanan Terminal Angkutan Darat	$\frac{\text{Jumlah orang yang terangkut dan terlayani}}{\text{Seluruh terminal yang tersedia}} \times 100\%$	
		Koordinasi pembangunan bidang perhubungan	koordinasi pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan	
		Rambu-rambu lalu lintas yang disediakan dan dipelihara	Jumlah Rambu-rambu lalu lintas yang tersedia dan dipelihara	
2	Terwujudnya sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	%tase jumlah sarana transportasi yg dilakukan pengujian kelayakan	$\frac{\text{jumlah sarana transportasi yang dilakukan pengujian}}{\text{Seluruh jumlah sarana transportasi yang ada}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
		Persentase ketertiban angkutan umum di jalan raya	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum di jalan raya yang ditertibkan}}{\text{Seluruh angkutan umum di jalan raya}} \times 100\%$	
		Tersusunnya database pelayanan jasa angkutan	Jumlah database pelayanan jasa angkutan yang disusun	
		%tase Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yg dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan prasarana yang dikembangkan}}{\text{Semua Sarana dan prasarana yang tersedia}} \times 100\%$	
		Awak kendaraan umum yg mendapatkan penghargaan (orang);	Jumlah Awak kendaraan umum yg mendapatkan penghargaan	
		Dokumen Perizinan perhubungan yg difasilitasi	Jumlah Dokumen Perizinan perhubungan yg difasilitasi	
		Hasil studi kebutuhan prasarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas	Jumlah studi kebutuhan prasarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan	
3	Terwujudnya partisipasi masyarakat peduli transportasi umum	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan	Dinas Perhubungan
		Jumlah Buku Produk Hukum dibidang perhubungan dan Transportasi	Jumlah Buku Produk Hukum dibidang perhubungan dan Transportasi	

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB
4	Tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan berkualitas dan berprestasi	Pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	
		Pendidikan dan pelatihan manajemen lalu lintas tingkat dasa	Jumlah pendidikan dan pelatihan manajemen lalu lintas tingkat desa yang dilaksanakan	
		JumlahKendaraanDinasPerhubungan yang dapatditingkatkanusiapakainya	Jumlah kendaraan dinas yang dapat ditingkatkan usia pakainya	
		%tase jumlah pemenuhan peralatan gedung yang memadai	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan peralatan gedung}}{\text{Jumlah yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	
		%tase ketersediaan ATK	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan ATK}}{\text{Jumlah ATK yang diperlukan}} \times 100\%$	

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 18 Januari 2018

KEPALA DINAS,

H. FADRIANSYAH, ST, M.AP
Pembina UtamaMuda
NIP 19590226 197903 1 001

1.	Terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang memadai	Prosentase Jumlah Tiang dan Lampu Jalan yang terpasang dan yang terpelihara		
		Jumlah dokumen Perencanaan pembgn prasarana dan fasilitas perhubungan	Tiang dan Lampu jalan yg terpasang Tiang dan lampu jalan yg terpelihara	
		Jmlh Koordinasi yg dilaksanakan dalam pembgn prasarana dan fasilitas perhubungan		
		Jumlah barang angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terlayani (UPTD Dermaga Senaken)		
		Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan yang disusun		
		Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kuaro)		
		Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kota)		
		Jumlah rambu-rambu lalu lintas		
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yg dipelihara		
		Jumlah alat sistem informasi Pelayanan PKB berbasis data yang tersedia		
	Terwujudnya sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Jumlah sarana transportasi yg dilakukan pengujian kelayakan		
		Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sungai		

		danau yg tersedia		
		Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat yg dikembangkan		
	Terwujudnya partisipasi masyarakat peduli transportasi umum	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan		
		Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia		
	Tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan berkualitas dan berprestasi	Jumlah materai Kantor yang tersedia		
		Jumlah Item jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia		
		jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan		
		Jumlah Jasa administrasi keuangan Dinas yg dilaksanakan tiap tahun		

		Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara		
		Jumlah jenis ATK yg disediakan		
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia		
		Jumlah makanan dan minuman rapat yg disediakan		
		Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/luar daerah yg dilaksanakan		
		Jumlah jenis bahan pembersih dan jenis alat pembersih gedung kantor		
		Jumlah Mobil jabatan yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)		
		Jumlah Mobil dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)		
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yg disusun (buku/buah)		
		Jumlah dokumen Data Statistik Dinas Perhubungan yang tersusun		
		Jumlah Dokumen Renstra yg disusun		
		Jumlah Dokumen Renja SKPD yg disusun		
		Jumlah Dokumen Renja yg dievaluasi		
		Jumlah Dokumen Review dan Revisi Renstra yg disusun		
		Jumlah Dokumen sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yg dibuat		

